

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam masa seperti ini merupakan tuntutan dari masyarakat. Sehingga setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak pada setiap kegiatan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Berakhirnya pelaksanaan APBD Kota Semarang setiap periode dalam satu tahun berarti berakhir pula program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun periode yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015. Mengungkap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang setiap tahunnya ini tidak terlepas dari yang telah diamanatkan APBD sendiri dan mengacu pada Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam Program Kerja dan kegiatan sebagai bentuk upaya kita bersama dalam mewujudkan Pembangunan Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan warga Kota Semarang menuju masyarakat aman, damai dan sejahtera.

Strategi dan kebijakan serta arah pelaksanaan APBD setiap tahunnya telah diupayakan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang bermunculan baik secara spesifik (sosial, ekonomi, politik) maupun secara umum (ketentraman dan ketertiban) lingkungan di masyarakat. Namun demikian, langkah dan tindakan serta antisipasi telah diupayakan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan cara antara lain mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya percepatan pembangunan Kota Semarang yang proporsional yang diwujudkan melalui pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan dan menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan pertanggung jawaban APBD pada hakikatnya adalah penyampaian laporan keuangan. Setiap Bidang-bidang yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan keuangan yang dalam prosesnya telah dilakukan pemotongan pajak untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan atau di realisasikan oleh setiap masing-masing Bendahara, sehingga memperjelas gambaran tentang keberhasilan-keberhasilan program-program yang telah tercapai dan yang belum tercapai berikut kendala-kendala yang dihadapi.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan mengurangi ketergantungan negara kita terhadap luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu pemotongan pajak belanja daerah pada setiap instansi-instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada dasarnya akan memberikan kontribusi atas pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat sehingga masyarakat merasa tentram dan nyaman, karena pada hakikatnya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang telah dijalankan oleh penulis selama kurang lebih 3 bulan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sehingga selama proses kegiatan Kuliah Kerja Praktek berlangsung mendasari untuk dituliskannya laporan Tugas Akhir ini yang menyeroti mengenai Mekanisme Pemotongan Pajak Belanja Daerah pada tempat berlangsungnya kegiatan kuliah kerja praktek berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Tugas Akhir ini akan memaparkan pembahasan dengan judul **“Mekanisme Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”** .

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang Lingkup dalam pembahasan Mekanisme Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang meliputi :

1. Pengertian Pengeluaran dan Pemotongan Pajak.
2. Pihak yang melakukan Pemotongan Pajak Belanja Daerah.
3. Tahapan dalam Pemotongan Pajak Belanja Daerah.
4. Manfaat Pemotongan Pajak.
5. Permasalahan yang mempengaruhi dalam pemotongan Pajak Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tugas akhir yang dibuat oleh penulis memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui lebih jelas mengenai Mekanisme pemotongan Pajak Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- b. Mengetahui manfaat apa saja dari pemotongan Pajak Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
- c. Untuk Mengetahui permasalahan yang paling dominan mempengaruhi pemotongan Pajak Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

b. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi maupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil Tugas Akhir ini.

c. Bagi Perusahaan.

Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masyarakat yang akan datang.

1.4. Cara Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini dalam proses pengumpulan data dapat diuraikan sesuai dengan jenis data sebagai berikut:

A. Jenis Data menurut Sifatnya :

1. Data Kualitatif

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data menggunakan Data Kualitatif. “Data Kualitatif merupakan data yang diukur secara tidak langsung seperti keterampilan, aktivitas, sikap, dan sebagainya (Marzuki, 2000 :55)”.

Ketika melakukan kegiatan Kuliah kerja Praktek penulis mendapatkan Data Kualitatif berbentuk keterangan-keterangan dari proses wawancara yang dilakukan penulis, sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran umum tentang Mekanisme Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

B. Jenis Data menurut Sumbernya

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang di wawancarai (Umar, 2003: 56)”.

Wawancara yang di lakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman interview guide. Wawancara dengan penggunaan interview guide dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam mengenai Mekanisme Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data ini diperoleh dengan menggunakan literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005: 62)”.

Penulis dalam prakteknya sering mendapatkan data-data dari para ahli yang sudah ada selain itu penulis juga menggunakan data-data dan catatan-catatan yang di peroleh dari internet.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode guna pengumpulan data, metode tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dengan menggunakan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara sistematis bagaimana proses kerja berjalan serta hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemotongan pajak berlangsung.

B. Metode Wawancara

“Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Gorys Keraf, 2004: 182)”.

Metode ini digunakan penulis dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang langsung bekerja melakukan kegiatan pembuatan Buku Kas Umum untuk memperoleh data-data yang dikenakan pemotongan pajak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

C. Metode Studi Pustaka

“Studi Pustaka adalah metode untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan jelas membaca dan mencatat secara sistematis dari suatu pustaka tertentu (Gorys Keraf, 2004: 182)”.

Dalam studi pustaka ini penulis memperoleh data-data penyelesaian masalah dan referensi dari Tugas Akhir terdahulu dan mencatat dari buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan Tugas Akhir serta mencatat dari arsip-arsip lainnya yang diperlukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas akhir ini , Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul , ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan sistematika pengumpulan data dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Berisi tentang gambaran secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang meliputi beberapa hal yang melatar belakangi sejarah berdirinya, dasar pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, penjabaran tugas pokok bidang ketahanan bangsa visi dan tujuan, deskripsi kerja, serta gambaran struktur organisasi.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian gambaran perpajakan secara umum, yang meliputi deskripsi pengertian pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Konsep Bendahara, Pengeluaran, Tahapan Dalam Pengeluaran Belanja Daerah, Mekanisme Pemotongan Pajak Belanja Daerah, permasalahan Pemotongan Pajak Belanja Daerah, dan Solusi dari permasalahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan.